

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRACT (ABSTRAK)	vii
SUMMARY	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
GLOSARY	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	49
G. Kerangka Pemikiran.....	107
H. Orsinilitas Peneltian	109
I. Metode Penelitian	119
J. Sistematika Penulisan	125
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	127
A. Rekonstruksi Sanksi Pidana	127

1. Pengertian Sanksi Pidana	128
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	143
B. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	151
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)	157
2. Tugas dan wewenang KPU	162
C. Tindak Pidana Pemilu	164
1. Jenis Tindak Pidana Pemilu	167
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu	179
D. Sejarah Undang-Undang Pemilu.....	183
E. Keadilan Hukum Pancasila	197
1. Keadilan Sosial	216
2. Keadilan Politik dan ekonomi	219

BAB. III. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota KPU yang Melakukan

Tindak Pidana Pemilu	222
A. Subtansi Penyelenggaraan Pemilu dalam Demokrasi	222
1. Integritas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu	208
2. Pemilu Jujur,adil,bersih	247
3. Asas dan Sistem Pemilihan Umum	255
4. Faktor yang mempengaruhi Pelanggaran Pemilu	264
B. Subtansi Hukum bagi Penyelenggara Pemilu	272
1. Kode Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu	272
2. Sanksi-sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik Pemilu	281
C. Penerapan Sanksi Pidana Anggota KPU belum berkeadilan	298
1. Kasus tindak pemilu di Indonesia	299

2. Putusan Pengadilan	305
-----------------------------	-----

BAB. IV. Kelemahan-Kelemahan dalam sanksi pidana terhadap anggota KPU

Yang melakukan tindak pidana pemilu	316
A. Kelemahan sanksi pidana bagi anggota KPU di tinjau dari aspek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	316
B. Vonis Percobaan Tindak Pidana Pemilu	320
C. Disparatis Tindak Pidana Pemilu	323
D. Teori-Teori Aliran Modern dalam sistem Pemidanaan	
E. Pemidanaan dalam persfektif (<i>strafsoort</i>)	330
F. Penjatuhan sanksi dalam Persfektif (<i>strafmaat</i>)	340
G. Pelaksanaan pemidanaan dalam perpektif (<i>strafmodus</i>)	348

BAB. V. Rekontruksi hukum sanksi pidana terhadap anggota KPU yang

melakukan Tindak Pidana Pemilu yang berbasis nilai keadilan	372
A. Pengaturan Sanksi Pidana Pemilu di beberapa negara.....	371
1. Indonesia	375
2. Malaysia	378
3. Fhilipina	383
4. Singapura	386
B. Rekostruksi pidana pemilu berdasarkan nilai	390
C. Rekonstruksi norma sanksi pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.....	419

BAB.VI. Penutup

A. Kesimpulan	410
Saran	412

DAFTAR SINGKATAN

BANWASLU	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	:	Hak Asasi Manusia
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
KKN	:	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KPKPN	:	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
PN	:	Penyelenggara Negara
PP	:	Penyelenggara Pemilu
PT	:	Pengadilan Tinggi
PEMILU	:	Pemilihan Umum
PERATUN	:	Peradilan Tata Usaha Negara
PILKADA	:	Pemilihan Kepala Daerah
PTTUN	:	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PILPRES	:	Pemilihan Presiden
PILCALEG	:	Pemilhan Calon Legislatif

SDM : Sumber Daya Manusia
RI : Republik Indonesia
TPK : Tim Pemberantasan Korupsi
UU : Undang-Undang
UUD NRI 1945 : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat dari Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Nomor 243/A.1/PDIH-FH/SA/IV/2018 Tertanggal 17 April 2018 perihal Penetapan Promotor Dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Surat dari Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Nomor 749/A.3/PDIH-FH/SA/VII/2019 Tertanggal 10 April 2019 perihal Penetapan Hasil Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Surat dari Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Nomor 160/A.5/PDIH-FH/SA/II/2020 Tertanggal 20 Maret 2020 perihal Penetapan Hasil Ujian Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
Gambar 1 : Skema Kerangka Pemikiran -----	85

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel 1 : Disertasi Yang Mempunyai Judul Dengan Ide Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi-----	93